

**Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(e-KTP) di Pekanbaru Tahun 2011-2012**

Oleh
Nurpajri Alamin
Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si
ajribgt@ymail.com

ABSTRACT

**Supervision of the Implementation Electronic Identity Card (e-KTP) Program in
Pekanbaru City Year 2011-2012**

Study entitled by supervision of the implementation of the electronic identity card (e-KTP) program in the Pekanbaru City is written in 2011-2012 to determine the regulatory process that undertaken by Department of Population and Civil in Pekanbaru in the implementation of e-ID card program and to determine the factors that hamper the implementation of supervision conducted by the Office of Civil Registration in Pekanbaru. This study describes how the process of the implementation supervision of the Head of Department in supervision assisted by a team that formed by the Head of the government programs that program-based electronic identity card. Inherent supervision theory is the premise in this study. This research describes the writing in a descriptive way that can be interpreted as a problem-solving procedure is surrounded by depicting or describing a state or subject or object of research at the present time.

Population and Civil Registration Department of is a government institution that is useful to perform most of local government tasks in terms of population administration, Department of Population and Civil Registration established by local regulation No. 8 of 2008.

The form of supervision by the Head of Department who assisted by the monitoring team is the supervision of the Monitoring Team socialization, infrastructure (operational vehicle and data recording devices), as well as performance evaluation and in conducting supervision UPTD on e-KTP program in Pekanbaru are the lack of Human Resources (Monitoring Team) in the implementation of the program, and the lack of supporting infrastructure of supervision, as well as the most important problem is the lack of coordination.

The conclusion that can be drawn from this research are implementation of e-KTP program in every district in Pekanbaru can not fulfill the target that given by the government, This is because the function of the monitoring team as supervisory less than optimal in performing supervision. And also have the some of the obstacle in conducting supervision of e-KTP program in Pekanbaru are the lack of Human Resources (Monitoring Team) in the implementation of the program, lack of supporting infrastructure of supervision, as well as the most important problem is the lack of coordination.

Keywords: Supervision, Implementation, E-KTP Program

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul pengawasan terhadap pelaksanaan program kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kota Pekanbaru tahun 2011-2012 ini ditulis untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program e-KTP dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan pengawasan Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan yang di bantu oleh tim yang di bentuk oleh Kepala Dinas terhadap program pemerintah yakni program kartu tanda penduduk berbasis elektornik. Teori pengawasan melekat merupakan landasan pemikiran dalam penelitian ini. Penelitian ini menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian pada saat sekarang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu lembaga pemerintah yang berguna untuk melakukan sebagian tugas pemerintahan daerah dalam hal administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di bentuk berdasarkan peraturan daerah no 8 tahun 2008.

Adapun bentuk dari pengawasan Kepala Dinas yang dibantu oleh tim monitoring tersebut adalah pengawasan terhadap sosialisasi Tim Monitoring, infrastruktur (kendaraan operasional dan perangkat perekaman data),serta evaluasi kinerja UPTD dan didalam melaksanakan pengawasan terhadap program e-KTP di Kota Pekanbaru adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (Tim Monitoring) dalam pelaksanaan program tersebut, dan kurangnya infrastruktur penunjang pengawasan, serta hal yang paling penting yang menjadi permasalahan adalah kurangnya koordinasi.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Pelaksanaan program e-KTP di setiap kecamatan di kota pekanbaru tidak dapat memenuhi target yang diberikan oleh pemerintah, ini dikarenakan fungsi dari tim monitoring sebagai pengawas kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan. Dan juga memiliki beberapa hambatan yakni didalam melaksanakan pengawasan terhadap program e-KTP di Kota Pekanbaru adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (Tim Monitoring) dalam pelaksanaan program tersebut, kurangnya infrastruktur penunjang pengawasan, serta hal yang paling penting yang menjadi permasalahan adalah kurangnya koordinasi.

Kata Kunci : Pengawasan, Pelaksanaan, Program E-Ktp

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai representasi dari sebuah Negara berkewajiban dalam memberikan perlindungan dan pengakuan atas keberadaan warga Negara berupa administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan berisi hal-hal yang sangat penting dalam setiap tindak tanduk warga Negara. Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (1) tentang administrasi penduduk.

Dalam pelaksanaan penerbitan dokumen penduduk, pemerintah membuat instansi atau lembaga pelaksanaan penerbitan dokumen penduduk menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 pasal 27 ayat (1) dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 59 ayat (1), dokumen penduduk meliputi, biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan kependudukan, dan Akta kelahiran, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil.

M. Noer sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menyatakan dalam penerapannya KTP ternyata belum efektif sebagai alat identitas diri karena satu orang bisa memiliki lebih dari 1 (satu) KTP, ini lah satu yang menjadi inspirasi pemerintah lahir nya program e-KTP.

E-KTP ialah kartu tanda penduduk elektronik dimana e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik mencantumkan NIK, NIK ialah Nomor Induk Kependudukan, NIK diberikan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk dan perekaman sidik jari. NIK wajib dicantumkan dalam KTP, artinya satu NIK satu KTP. Jika satu NIK, satu KTP, satu penduduk valid maka valid juga untuk pemilu.

Hal ini tentu tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Kecamatan agar dapat memenuhi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/3091/SJ/tanggal 24 Agustus 2009.

Pengawasan merupakan faktor penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintah agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang berperan untuk mengendalikan jalannya roda pemerintahan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Melalui pengawasan, maka pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan menurut peraturan yang berlaku.

Di Kota pekanbaru pengawasan belum begitu optimal dilakukan dan juga belum ada fasilitas yang memadai untuk pembuatan KTP berbasis *elektronik* (e-KTP) ini. Tugas Akhir ini akan membahas mengenai **Pengawasan terhadap pelaksanaan program e-KTP di pekanbaru** sehingga dapat mengimplementasikan pembuatan e-KTP oleh unit pelaksana tugas daerah (UPTD) di kantor Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru secara baik dan benar, sehingga diharapkan dapat memperlancar dan meminimalkan kesalahan pada proses pemasukan data kependudukan oleh petugas kantor Kecamatan di Kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah

Dari uraian diatas jelas bahwa pengawasan sangatlah penting dalam setiap pelaksanaan dari suatu rencana, agar rencana yang telah ditetapkan tidak terjadi penyelewengan. Maka dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian :

Bagaimana pelaksanaan pengawasan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelaksanaan program e-KTP di Kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program e-KTP.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru.

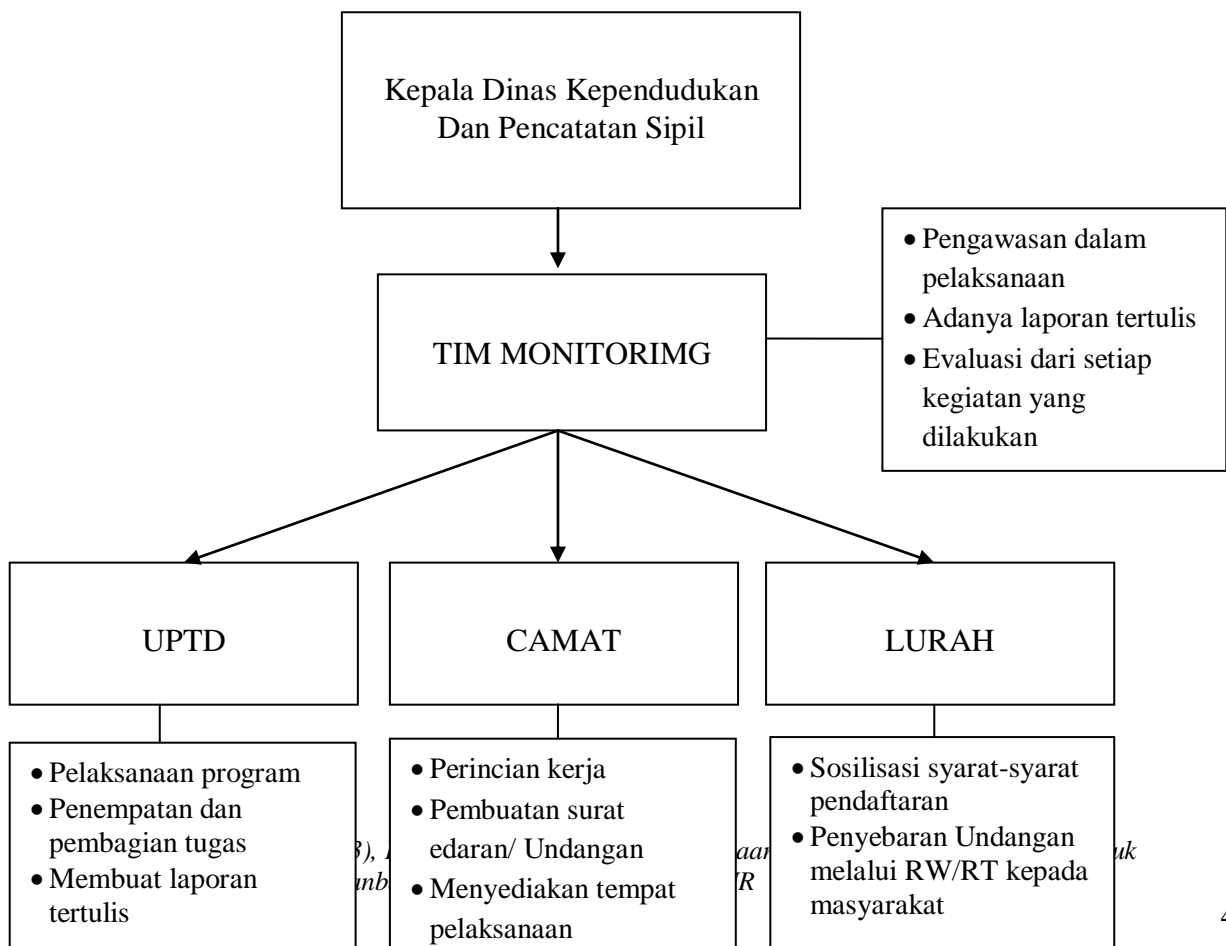
Kerangka Teori

menurut Sofyan (2004 : 23) pengawasan yang efektif dapat dilakukan melalui pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Sujamto dalam buku Sofyan (2004 : 23) mengemukakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan atau usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga pengawasan ini disebut juga pengawasan atasan langsung.

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir



Defenisi Konsep

Beberapa konsep yang akan dioperasikan dalam penelitian ini, perlu ada batasan pengertian yang jelas untuk mendapatkan kesamaan bahasa yaitu:

1. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pengamatan, pemantauan, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru selaku Kepala Dinas.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kota Pekanbaru khususnya pada Kecamatan Pekanbaru Kota dan Kecamatan Tampan.
3. E-KTP adalah kartu tanda penduduk elektronik dimana e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dan Memuat Chip elektronik.
4. Pelaksanaan pengawasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kota Pekanbaru yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja UPTD dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka untuk dekriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dan penyusunan data, yang meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut dan wawancara bersama key informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini.

Hasil Pembahasan

O' Donnell dalam Josef Riwu Kaho (2005 :267) mengatakan, pengawasan /pengontrolan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

Pengawasan bukanlah suatu kegiatan untuk mencari kesalahan, pengawasan merupakan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Pengawasan sangat diperlukan didalam menjalankan sebuah kebijakan agar nantinya diharapkan untuk mendapatkan hasil yang optimal dari kebijakan tersebut. Didalam sebuah kebijakan atau program pastinya memiliki harapan untuk dapat mencapai tujuan seperti yang dicita-citakan bersama. Untuk dapat mengukur apakah kebijakan atau program tersebut telah berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama, maka perlu adanya suatu indikator yang nantinya akan menjadi tolak ukur proses keberhasilan program tersebut. Sangat banyak sekali jenis indikator yang digunakan, salah satu bentuk kongkrit tersebut terdapat didalam suatu tindakan yang *Jurnal Ilmu Pemerintahan (2013), Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2012, FISIP – UR*

dinamakan pengawasan.

1. Pembentukan Tim Monitoring/Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan sesuatu hal apapun yakni dalam pembangunan negara kita ini sangat perlu adanya sumber daya manusia yg berkualitas tentunya. Dalam hal ini yang di jelaskan mengenai sumber daya manusia (SDM) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Pekanbaru yakni petugas yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program e-KTP yang turun langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program e-KTP di Kota Pekanbaru jumlah dari petugas pengawas yakni berjumlah 3 orang yang memonitoring pelaksanaan program e-KTP di setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Mohd. Noer, MBS, SH, M.Si MH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil mengatakan

“Kami melaksanakan surat Keputusan dari MENDAGRI dimana dalam surat edaran tersebut berisikan tentang pembentukan suatu Tim pengawas atau Tim Monitoring guna melaksanakan tugas pengawasan agar pelaksanaan program e-KTP di Kota Pekanbaru berjalan sesuai yang direncanakan, tim Monitoring terdiri dari 3 orang staff di Dinas kami (DISDUKCAPIL) dan diketuai langsung oleh sekretaris dinas” (*Wawancara tanggal 23 juli 2012*)

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwasanya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah membentuk suatu tim Monitoring sesuai dengan perintah dari surat keputusan MENDAGRI guna melaksanakan tugas pengawasan agar pelaksanaan program e-KTP di kota Pekanbaru berjalan sesuai yang direncanakan. Dengan demikian dalam hal pengawasan yang akan dilakukan petugas pengawasan yang telah ditetapkan oleh DISCAPIL Kota Pekanbaru benar-benar berkompeten dalam mengawasi pelaksanaan e-KTP di Kota Pekanbaru.

Penyataan ini juga dibenarkan oleh bapak Drs. H. Zulfikar, M. Si selaku ketua tim Monitoring mengatakan:

“Benar Kepala Dinas telah membentuk tim Monitoring dan saya jadi ketua tim nya dan ada tiga orang lagi sebagai anggotanya sesuai dengan surat keputusan MENDAGRI, tapi saya (ketua tim Monitoring) merasa kewalahan dengan anggota hanya 2 orang saja sementara jumlah kecamatan di Kota Pekanbaru ini ada 12 kecamatan dan jumlah penduduk yang berbeda-beda” (*wawancara tanggal 25 juli 2012*)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar bahwasanya jumlah tim Monitoring tidak memadai untuk melakukan pengawasan secara optimal dilihat dari kekurangan nya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) hanya berjumlah 3 orang. Sedangkan kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru berjumlah 12 kecamatan dengan jumlah penduduk yang berbeda hal ini merupakan kendala bagi tim Monitoring untuk melaksanakan tugas secara optimal.

2. Infrastruktur

1. Kendaraan Operasional

Infrastruktur juga merupakan salah satu bagian yang harus ada di dalam pembangunan di Negara kita ini, infrastruktur yang di maksud disini yaitu sarana/prasarana yang mendukung dalam kelancaran suatu pekerjaan. Kondisi infrastruktur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pengawasan langsung kelapangan

terhadap pelaksanaan program e-KTP Kota Pekanbaru, salah satunya yakni kendaraan operasional yang tak tersedia untuk melakukan pengawasan di 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zulfikar S.Sos selaku ketua tim Monitoring

”Kami setiap hari secara bergantian turun kelapangan, lokasi/kecamatan yang telah ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program e-KTP. Jadi, pengawasan yang kami lakukan tidak setiap hari ke kecamatan-kecamatan. Maksudnya, misalnya hari senen petugas yang telah ditunjuk melakukan monitoring di kecamatan Tampan, kemudian esok harinya petugas yang lain melakukan di kecamatan Pekanbaru Kota, begitu seterusnya, hal ini disebabkan karena kendaraan yang digunakan dalam melakukan monitoring menggunakan kendaraan pribadi petugas.” (*wawancara tanggal 25 juli 2012*)

Dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Zulfikar bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh tim Monitoring belum begitu optimal di karenakan kendaraan Operasional untuk melakukan monitoring tidak tersedia hanya mengandalkan kendaraan pribadi petugas. Hal ini akan berdampak kepada kurang maksimalnya proses pengawasan yang akan dilakukan oleh Tim Pengawas pelaksanaan Program e-KTP.

Hal ini juga dibenarkan Oleh Yumtita Nia salah seorang petugas perekam e-KTP yang mengatakan

“Kami petugas pelaksana tidak mengetahui jadwal-jadwal petugas monitoring turun kelapangan, jadi kami sebagai petugas pelaksana harus siap apabila tim Monitoring melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program e-KTP. Kami juga tidak mengetahui petugas monitoring turun kelapangan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan yang disediakan oleh Dinas untuk memonitoring ke UPTD di Kecamatan.” (*wawancara tanggal 25 juli 2012*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat melihat bahwa tim Monitoring dalam melakukan pengawasan kurang optimal dikarenakan infastruktur/kendaraan operasional tidak dimiliki oleh tim Monitoring. Dalam melakukan pengawasan tim Monitoring yang telah dibentuk oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat bekerja dengan optimal dikarenakan infastruktur tidak disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Perangkat Perekaman

Adapun infrastruktur selain kendaraan ada juga perangkat perekaman yang berada di temept perekaman yakni di kecamatan sperangkat yang di miliki Dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah perangkat keras yang di sediakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna mempelancar kenerja para petugas UPTD di Kecamatan dalam melaksanakan program e-KTP. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III.1
Perangkat Keras e-KTP di Kecamatan

No	Nama Perangkat	Jumlah
1	Server Database	1 buah
2	UPS 1000 VA	1 buah
3	Desktop PC	2 buah

4	UPS 1000 VA	2 buah
5	Fingerprint scanner	2 buah
6	Smart card reader	2 buah
7	Signature pad	2 buah
8	Digital scanner	1 buah
9	Kamera digital	2 buah
10	Hard disk external	1 buah
11	Switch dan cabling	1 buah
12	Router	1 buah

Sumber: <http://BPP-SIAK-EKTP-Jembrana-20100923.com>

Dilihat dari tabel di atas penulis dapat melihat bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh tim monitoring tidak hanya meliputi pengawasan terhadap petugas UPTD ataupun kinerja yang dijalankan oleh UPTD saja tetapi juga dalam pengawasan perangkat-perangkat keras yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan oleh Mendagri.

Hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak nya meliputi kinerja para petugas UPTD saja:

“kami melakukan pengawasan tidak hanya meliputi kinerja saja tapi juga meliputi perangkat-perangkat yang disediakan oleh MENDAGRI guna percepatan atau kelancaran pelaksanaan program e-KTP ini, hal ini kami lakukan supaya kinerja dari petugas UPTD berjalan sebagaimana mestinya. Cara kami melakukan pengawasan terhadap perangkat-perangkat ini kami menerima laporan saja dari petugas UPTD, tidak ada prosedur untuk pengawasan perangkat-perangkat ini hanya menerima laporan saja dari UPTD.”

Di lihat dari hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar ketua tim monitoring penulis dapat melihat bahwa tim monitoring tidak memiliki prosedur pengawasan terhadap perangkat-perangkat yang disediakan oleh MENDAGRI tim monitoring hanya menerima laporan hal-hal yang terjadi pada perangkat-perangkat keras tersebut. Hal ini sungguh sangat ironis karena dalam hal pengawasan tim monitoring hanya menerima laporan saja dari petugas UPTD dalam hal laporan perangkat-perangkat yang di sediakan oleh MENDAGRI ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

3. Sosialisasi

Sosialisasi adalah pengenalan dan penyebarluasan program kepada masyarakat dan aparat yang menjadi sasaran program serta kepada pihak-pihak lain berkepentingan. Isi informasi yang di sebarluaskan bermacam-macam tergantung pada tujuan program, pelaksanaan sosialisasi dikatakan berhasil apabila tujuan dari sosialisasi itu terlaksana. Sosialisasi sebaiknya dilakukan melalui lebih dari satu metode dan berkelanjutan.

Namaum fakta di lapangan yang penulis peroleh yaitu sosialisasi untuk perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilaksanakan di kecamatan Pekanbaru Kota hanya

melalui ketua RT dan ketua RW untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat di masing-masing kelurahan ketika mengantarkan surat undangan ke masyarakat. Sedangkan sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dilakukan dengan cara memasang spanduk, baliho di pinggir-pinggiran jalan dan melalui media televisi yang berisikan ajakan dan himbauan kepada masyarakat untuk segera melakukan perekaman.

Berikut wawancara dengan Camat Pekanbaru Kota Bapak Erisman Boestamam S,E. MM.

“Tidak terfikirkan sama kami bahwa surat undangan tidak sampai ke tangan masyarakat, karena pada umumnya masyarakat di kota pekanbaru ini telah mengetahui ada nya program e-KTP ini melalui media televisi yang disampaikan oleh pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat sehingga mereka dapat datang dengan sendirinya ke Kantor Camat untuk melakukan perekaman”

Dari hasil wawancara di atas bersama Bapak Camat Pekanbaru Kota Erisman Boestamam S,E.MM dapat dilihat bahwa sosialisasi yang di lakukan oleh pihak kecamatan hanya sebatas sosialisasi melalui media saja, tidak melakukan sosialisasi langsung bertatap muka dengan masyarakat. Sehingga masyarakat masih banyak yang bersikap apatis.

Berikut wawancara dengan saudara Desi selaku masyarakat Pekanbaru Kota yang mengatakan:

“saya melihat spanduk yang ada di pinggir-pinggir jalan yang menyerukan AYO SUKSESKAN PROGRAM e-KTP, tetapi saya tidak mengetahui bagaimana cara untuk merekam e-KTP di kantor Camat, dan dari pihak RT pun tidak ada menyampaikan bagaimana melakukan perekaman di Kantor Camat”

Kurangnya sosialisasi pembuatan e-KTP kepada masyarakat khususnya cara dan proses pembuatan e-KTP ini bisa menjadi salah satu penyebab terlambatnya masyarakat melakukan perekaman e-KTP ke kantor camat, selain itu ketua RT tidak menjelaskan proses pembuatan mereka sendiri juga belum mengetahui bagaimana proses pembuatan e-KTP ketika membagikan surat undangan kepada warganya.

Akibat tidak terlaksananya sosialisasi dengan baik oleh kecamatan Pekanbaru Kota banyak masyarakat yang menjadi *miss* komunikasi sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang akurat. Berikut yang di temukan oleh penulis melalui wawancara dengan saudara Desi selaku masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota:

“saya juga bingung dengan petugas kecamatan, mereka bilang yang bisa melakukan perekaman hanya yang mendapatkan undangan, makanya saya langsung pulang kemarin itu, eh tiba-tiba saya mendapatkan kabar bahwa perekaman bisa dilakukan tanpa membawa surat undangan, saya merasa di permainkan harus bolak-balik ke Kecamatan dan hal ini saya rasa sangat membuang waktu saya, dan saya rasa tidak ada gunanya spanduk-spanduk itu, yang di himbau seperti ini tapi beda dengan kenyataannya di Kecamatan”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi tidak berjalan dengan baik ini di sebabkan tidak adanya pelaksanaan sosialisasi memberitahukan proses dan pelaksanaan pembuatan e-KTP dengan jelas dan terperinci kepada masyarakat, sehingga masyarakat terkesan mencari sendiri informasi dan apabila ada perubahan-perubahan dalam melakukan perekaman, seperti syarat-syarat tidak wajibnya membawa

undangan lagi saat perekaman ini terlihat bahwa lambannya pihak kecamatan memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi atas perubahan ketentuan syarat-syarat ketika sudah berada di kecamatan.

4. Evaluasi Hasil Pekerjaan

Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan tercapai. Hasil evaluasi kinerja individu dapat dimanfaatkan untuk banyak penggunaannya. Misalnya Peningkatan kinerja, Pengembangan SDM, Pemberian kompensasi, Program peningkatan produktivitas, Program kepegawaian, Menghindari perlakuan diskriminasi

Hasil wawancara dengan bapak M.Noer selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan:

“Saya selaku kepala dinas telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tim Monitoring yang berguna untuk Peningkatan kinerja, Pengembangan SDM, Pemberian kompensasi, Program peningkatan produktivitas, Program kepegawaian, Menghindari perlakuan diskriminasi terhadap salah satu pihak.”

Dapat dilihat bahwa kepala dinas telah melakukan evaluasi kinerja dimana fungsi dari evaluasi adalah untuk mengoreksi apa-apa saja yang telah di kerjakan atau hal-hal apa saja yang belum di laksanakan. Dalam pelaksanaan evaluasi kepala dinas melakukan pengoreksian terhadap tim monitoring yang berguna untuk mengetahui adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh tim monitoring.

Hal ini juga di benarkan oleh ketua tim monitoring bapak Zulfikar selaku ketua tim monitoring:

“benar bahwa kepala dinas telah melakukan evaluasi terhadap kinerja tim monitoring yang berguna untuk mempelancar fungsi dari tim monitoring, kami sebagai tim monitoring telah berupaya dengan maksimal tetapi kami juga manusia yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan,”

Dilihat dari hasil wawancara dengan ketua tim monitoring penulis dapat melihat bahwa kepala dinas telah melakukan evaluasi terhadap kinerja dari tim monitoring. Namun memang fungsi dari tim monitoring yang kurang maksimal dimana dari hasil wawancara dengan kepala tim monitoring mengatakan tim monitoring telah berupaya dengan maksimal tetapi kami juga manusia yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan ini di lihat bahwasanya tim monitoring telah melakukan upaya yang maksimal, namun memang terjadi beberapa kendala dalam melakukan pengawasan.

A. Hambatan-hambatan pengawasan DISDUKCAPIL terhadap pelaksanaan program e-KTP.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh Kepala Dinas DISDUKCAPIL dalam hal pelaksanaan pengawasan mengenai program e-KTP di lihat dalam beberapa aspek yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan sesuatu hal apapun yakni dalam pembangunan negara kita ini sangat perlu adanya sumber daya manusia yg berkualitas tentunya. Dalam hal ini yang di jelaskan mengenai sumber daya manusia (SDM) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Pekanbaru yakni petugas yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program e-KTP yang turun langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program e-KTP di Kota Pekanbaru jumlah dari petugas pengawas yakni berjumlah 3 orang yang memonitoring pelaksanaan program e-KTP di setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru.

Fakta di lapangan yang penulis peroleh yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam hal pengawasan yang berfungsi sebagai pengawas di lapangan, ini dilihat dari kurang maksimalnya fungsi pengawasan yang di lakukan oleh tim monitoring ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Camat Pekanbaru Kota Bapak Erisman Boestamam S.E, MM yang mengatakan :

“dalam hal pengawasan yang di lakukan DISDUKCAPIL belum maksimal karena tim monitoring jarang sekali turun kelapangan, ditambah lagi dengan petugas pengawas yang kurang memadai untuk melakukan pengawasan rutin ke kecamatan-kecamatan yang ada di kota pekanbaru dalam hal ini kecamatan pekanbaru kota, ini sungguh sangat berpengaruh terhadap kinerja petugas UPTD di kecamatan kami.”

Dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Erisman selaku camat pekanbaru kota yang mengatakan kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini petugas tim monitoring, penulis dapat melihat bahwa kurangnya perhatian tim pengawas dalam pengawasan terhadap kinerja petugas UPTD ini sangat mempengaruhi oleh jumlah petugas dalam hal pengawasan pelaksanaan program e-KTP ini. Kurangnya jumlah petugas pengawas berdampak terhadap kurang optimalnya kinerja petugas UPTD dalam hal memenuhi target yang telah diberikan DISDUKCAPIL ke kecamatan pekanbaru kota.

2. Infrastruktur

Infrastruktur juga merupakan salah satu bagian yang harus ada di dalam pembangunan di Negara kita ini, infrastruktur yang di maksud disini yaitu sarana/prasarana yang mendukung dalam kelancaran suatu pekerjaan. Kondisi infrastruktur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pengawasan langsung kelapangan terhadap pelaksanaan program e-KTP Kota Pekanbaru, salah satunya yakni kendaraan oprasional yang tak tersedia untuk melakukan pengawasan di 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

Tidak adanya kendaraan oprasional untuk melakukan pengawasan langsung merupakan hambatan dalam melakukan pengawasan langsung kelapangan hal ini dibenarkan oleh bapak Zulfikar selaku ketua tim monitoring dalam wawancaranya:

“Dalam hal pengawasan petugas kami melakukan monitoring menggunakan kendaraan pribadi milik mereka sendiri, hal ini memang saya akui sebagai kendala dalam melakukan pengawasan, ini dikarenakan DISDUKCAPIL tidak

memiliki kendaraan operasional yang berguna untuk melakukan pengawasan turun langsung ke lapangan.”

Dapat di lihat dari hasil wawancara dengan bapak Zulfikar penulis dapat dilihat bahwa dalam melakukan pengawasan tim monitoring melakukan dengan menggunakan kendaraan pribadi hal ini menjadi suatu kendala dalam melakukan pengawasan yang efektif. Kendala dalam infrastruktur ini menjadi suatu kendala, hal ini telah diakui oleh ketua tim monitoring bapak Zulfikar dalam wawancara bersama nya.

3. Koordinasi

Dalam melakukan tugas pemerintah dalam hal ini pengawasan, selalu menciptakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang masih berada dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri, oleh sebab itu hubungan koordinasi yang baik dapat menentukan tercapainya tujuan bersama sesuai dengan ketentuan yang ada, Namun fakta yang ada di lapangan yang diperoleh penulis yaitu dalam melakukan pengawasan program e-KTP di setiap kecamatan terutama di kecamatan Tampan dan Pekanbaru Kota, koordinasi antara petugas terkait tidak terlaksana dengan baik. Petugas-petugas tersebut seperti tidak merasa bertanggung jawab atau lepas tangan, hal ini terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman sesuai dengan jadwal.

Koordinasi dalam pengawasan program e-KTP di Kota Pekanbaru di lakukan secara vertikal. Dimulai dari Kepala dinas, Tim Monitoring, Kecamatan, UPTD dan kemudian sampai ke Kelurahan. Harapan dari koordinasi yang dilakukan dalam pengawasan ini agar petugas yang terkait mengerti dengan fungsi dan tugas nya masing-masing, dan agar masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam melakukan perekaman e-KTP. Namun kenyataannya koordinasi yang di lakukan tidak sampai ke kelurahan, hal ini sungguh berdampak ke pelaksanaan program e-KTP ini dimana pelaksanaan menjadi terganggu dan masyarakat kurang mendapatkan informasi.

Seperti yang dikemukakan oleh masyarakat saudara Erna selaku masyarakat kelurahan Delima kecamatan Tampan mengatakan:

“menurut saya pelaksanaan program e-KTP ini sangat bagus tetapi saya merasa informasi yang diberikan ke masyarakat sangatlah kurang sehingga saya sendiri yang mencari-cari tahu tentang program ini, informasi yang di berikan melalui RT sangatlah kurang karena beberapa kali saya bertanya saya tidak mendapatkan informasi yang memuaskan, sehingga saya datang sendiri ke kecamatan untuk mencari informasi yang lengkap.”

Dari hasil wawancara bersama saudara Erna selaku masyarakat kecamatan tampan penulis dapat melihat bahwa dalam melaksanakan program e-KTP ini masyarakat kurang mendapatkan informasi ini mengindikasikan bahwa adanya ketidak sinkronan antar pihak-pihak terkait, dari pihak kelurahan tidak mau di persalahkan akibat terjadinya keterlambatan masyarakat melakukan perekaman dan dari pihak RT juga telah merasa melakukan amanah dari pihak kelurahan. Apabila terjadi keterlambatan maka masyarakatlah yang di persalahkan oleh pihak kecamatan.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian tentang pengawasan terhadap program e-KTP di Kota Pekanbaru tahun 2011-2012 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan e-KTP dilaksanakan di Kota Pekanbaru pada tahun 2010-2011, namun pada akhirnya diperpanjang kembali sampai Oktober tahun 2013 karena terdapat beberapa hambatan, yang seharusnya pelaksanaan program e-KTP selesai pada akhir tahun 2012.
2. Pelaksanaan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan fungsi pengawasannya adalah mengawasi Tim Monitoring.
3. Adapun bentuk dari pengawasan tersebut adalah pengawasan terhadap sosialisasi Tim Monitoring, infrastruktur (kendaraan operasional dan perangkat perekaman data),serta evaluasi kinerja UPTD.
4. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi didalam melaksanakan pengawasan terhadap program e-KTP di Kota Pekanbaru adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (Tim Monitoring) dalam pelaksanaan program tersebut, kurangnya infrastruktur penunjang pengawasan, serta hal yang paling penting yang menjadi permasalahan adalah kurangnya koordinasi.

Saran

1. Perlu adanya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru, RT/RW dengan masyarakat didalam mensukseskan program e-KTP maupun nantinya terdapat program-program lainnya yang melibatkan mereka.
2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih optimal mengenai esensi dari pembuatan e-KTP bagi masyarakat.
3. Perlu adanya regulasi khusus membahas tentang pengawasan terhadap program atau kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Daftar Pustaka

- Riwu Kaho, MPA. Drs. Josef, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan Safri, 2004, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: PT. Pusta Quantum.
- Sujamto, 2003, *Beberapa Pengertian Dibiidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

SUMBER LAIN

- Sumber : <http://BPP-SIAK-EKTP-Jembrana-20100923.com>
- Sumber : Riau Pos, Rabu 15 Februari 2012